

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan program pendidikan yang memprioritaskan kegiatan belajar mengajar pada peningkatan *skill* mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan vokasional tersebut memiliki sistem pembagian belajar mengajar sebesar 60% praktik dan 40% teori, sehingga dengan persentase yang lebih besar pada kegiatan praktik diharapkan mahasiswa dapat lebih memperdalam pengetahuan dunia kerja serta yang linier dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Salah satu bentuk implementasi dari program pendidikan vokasional ini adalah diselenggarakannya Program Magang wajib bagi mahasiswa dan merupakan syarat mutlak kelulusan

Program Magang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa pada semester VII untuk jenjang Sarjana Terapan (D-IV) termasuk mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Bobot Program Magang pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik adalah sebesar 20 sks yang setara dengan 700 jam magang atau 4 (empat) bulan efektif. Sejalan dengan latar belakang program studi Akuntansi Sektor Publik yaitu dalam konteks publik atau organisasi nirlaba maka Program Magang pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik dilaksanakan pada instansi pemerintahan, salah satunya yaitu KPPN Bondowoso karena sesuai dengan mata kuliah perbendaharaan negara. Kegiatan Program Magang pada KPPN Bondowoso dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan 30 Desember 2023.

KPPN Bondowoso merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Tugas KPPN Bondowoso sesuai dengan PMK RI No 262/PMK.01/2016 yaitu melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan

dan pengeluaran anggaran melalui dana dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada struktur organisasi, terdapat 5 seksi pada instansi KPPN Bondowoso, yaitu Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai beberapa tugas, salah satunya melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. LPJ merupakan laporan yang dibuat oleh bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang. Jenis laporan pertanggungjawaban perbendaharaan ada 2 yaitu Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. LPJ Bendahara wajib disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur, hal ini tercantum pada Pasal 10 Ayat 7 Peraturan Dirjen Perben No. PER-3/PB/2014.

Ada beberapa nilai yang harus di sesuaikan antara LPJ Bendahara dengan yang tercatat di aplikasi yaitu saldo awal, saldo uang di rekening bank, jumlah uang di brankas, kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan), penyetoran kas ke negara, saldo UP (bendahara pengeluaran), meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran PNBK (bendahara penerimaan), penyetoran pajak (bila ada), dan ijin rekening bendahara (Pasal 11, Ayat 2 dan Ayat 3). Aplikasi yang dimaksud untuk menguji kesesuaian LPJ dari bendahara yang dikirimkan satker yaitu SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi), dengan aplikasi SPRINT pengecekan LPJ menjadi lebih mudah karena tidak harus menguji kesesuaian saldo secara manual. LPJ yang dikirimkan oleh satker akan otomatis terlihat nilainya di aplikasi SPRINT sehingga Petugas Seksi Vera langsung menyesuaikan saldo melalui aplikasi SPRINT.

Atas paparan latar belakang di atas, kesesuaian LPJ Satuan Kerja akan diverifikasi melalui berkas non-fisik LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan. Maka dari itu, judul yang diangkat yaitu “Prosedur Verifikasi LPJ dari Bendahara Satuan Kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso”.